

DAFTAR REFERENSI

- Baharuddin, Syafri Adnan. (2008, Juli). *Asset management in governments*.
Dipresentasikan pada Public Sector Conference, Jakarta.
http://pkblu.perbendaharaan.go.id/blu_tetap.php
<http://rscm.co.id/pages.php?id=1#sejarah>
- Hoesada, Jan. (2007). Duapuluh lima alasan penyusutan asset tetap dalam akuntansi pemerintahan. www.google.com. 1-3.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt & Terry D. Warfield. (2007). *Intermediate accounting 12th ed*. New Jersey: John Wiley and Sons Pte Ltd.
- Laporan Keuangan RSUPN-CM 2004-2007
- Mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah amburadul. (n.d). 10 Oktober 2007. www.tempointeraktif.com
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati. (2007). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Omar, M. (15 November 2008). Health sector decentralization in developing countries: unique or universal. www.Hospitalmanagement.net
- Peterson, Raymond H. (1994). *Accounting for fixed assets*. New Jersey: John Wiley and Sons Pte Ltd
- PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK No. 08/ PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
- PMK No. 120/PMK.06/2006 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- PMK No. 119/ PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- PMK No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PSAK 16 tentang Aset Tetap

PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Siegel, Joel G. and Jae K. Shim. (1987). *Dictionary of Accounting Terms*. New

York: Barrons

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

